

ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DENGAN PENDEKATAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP)

Adi Susanto¹
Lina Krisnawati²
Sutarmin³

ABSTRACTION

Non-cash transactions in Indonesia are still low, one of which is triggered by the low involvement of small and medium enterprises (SMEs) retail in Indonesia who have not implemented non-cash transactions in their business environment. This study aims to analyze factors supporting the implementation of non-cash transactions in retail SMEs. The method used in this research is by Analytical Hierarchy Process (AHP) approach. The results of the study found that non-cash transactions implementation can be improved by maximizing potential carrying capacity: (1) Speed, (2) Security, (3) Efficiency / Practice, (4) Value of money, and (5) Government program. The main supporting factor that gets the highest priority is efficiency or practicality of 23%.

Key word : *Non-Cash Transactions, AHP, SMEs*

PENDAHULUAN

Indonesia masih menempati urutan bawah dalam prosentase pelaksanaan transaksi non tunai. Menurut catatan BI ada 48.000 transaksi dengan nilai Rp 1.4 M perhari pada tahun 2009. Harus disadari bahwa pembayaran melalui transaksi tunai memiliki banyak kelemahan pembayaran non tunai. Beberapa kelemahan dari pembayaran tunai adalah sebagai berikut : (1) Kurang praktis; (2) Waktu transaksi lebih lama; (3) Resiko adanya uang palsu; (4) Nilai uang kurang terjaga; (5) Kurang aman.

¹Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UniversitasPeradaban; susanto.adi@gmail.com

²Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UniversitasPeradaban; linakrisnawati@gmail.com

³Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UniversitasPeradaban; sutarmin74@gmail.com

Beberapa upaya telah dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk memacu peningkatan transaksi non tunai, yaitu salah satunya oleh Bank Indonesia sebagai Bank Central di Indonesia. Salah satu program yang telah dijalankan adalah pencanangan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada tanggal 14 Agustus 2014 oleh Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardjoyo. Pencanangan gerakan ini merupakan penyegaran kembali Peraturan Pemerintah no 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam Layanan Keuangan Digital. Melalui GNNT diharapkan dapat mengakselerasi penggunaan instrumen pembayaran non tunai yang telah diupayakan oleh Bank Indonesia dari beberapa tahun sebelumnya. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendorong penggunaan instrumen pembayaran non tunai, antara lain kegiatan fasilitasi penggunaan uang elektronik pada sektor transportasi publik, seperti TransJogja, TransSolo, dan TransJakarta. Beberapa strategi GNNT yang sedang dijalankan adalah sebagai berikut: (1) Pembentukan Kawasan Non Tunai di Lingkungan Kampus; (2) Instrumen Pembayaran Non Tunai untuk Layanan Keuangan Pemerintah; (3) Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah.

Tiga strategi GNNT yang sedang digalakkan masih berkisar pada lapisan masyarakat paling atas dan lapisan paling bawah. Lapisan paling atas adalah kebijakan non tunai di kampus dan pemerintahan, sedangkan lapisan paling bawah adalah bantuan kepada masyarakat kurang mampu (bantuan sosial pemerintah). Jadi ada salah satu hal yang terlupakan oleh penentu kebijakan bahwa

masih ada level penghubung atau level tengah yang membuat kebijakan ini menjadi “*diskontinyu*”, yaitu perhatian strategi di level ritel UKM. Harus disadari bahwa ritel Indonesia memegang peranan penting dalam penetrasi dan perluasan transaksi non tunai bagian tengah dan mengkontinyukan program tersebut. Ritel secara langsung menyentuh seluruh masyarakat konsumen Indonesia.

Peritel-peritel yang berbasis UKM merupakan potensi yang sangat besar bagi pengembangan dan perluasan transaksi keuangan non tunai di Indonesia. Perlu upaya yang besar dalam mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi non tunai, namun tanpa didukung oleh instrumen yang memadai dan peran masyarakat, maka program ini akan sulit untuk berkembang dengan cepat dan optimal. Salah satu kegiatan yang bisa digunakan untuk mendukung GNNT adalah implementasi instrumen pembayaran non tunai berupa mesin *EDC* (*Electronic Data Capture*) pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bidang ritel. Berdasarkan kajian McKinsey (2013), jumlah transaksi non tunai ritel Indonesia baru mencapai 0,6 %, sedangkan untuk Thailand 2,8 %, Malaysia sebesar 7,7 % dan Singapura telah mencapai 44,5 %. Ini merupakan pekerjaan rumah sekaligus tantangan yang sangat besar bagi para stakeholder untuk mempercepat pertumbuhan transaksi non tunai di Indonesia. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,0 % masih relatif tinggi di antara negara ASEAN 5, yaitu 4,7 % sistem pembayaran non tunai di Indonesia juga harus dipacu untuk mengejar ketertinggalan.

Permasalahan yang nyata di masyarakat UKM adalah sangat sedikitnya para pelaku UKM yang memasang atau mengimplementasikan penggunaan EDC (Electronic Data Capture) di lingkungan bisnisnya. Hal ini tentunya sangat menghambat pertumbuhan transaksi yang melibatkan masyarakat luas. Di satu sisi menurut BPS jumlah UKM di Indonesia adalah jumlah UKM yang paling besar dibanding negara-negara lain, yaitu 56.534.592 pelaku UMKM tahun 2012. Dengan member kontribusi terhadap PDB 58,92 persen dan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja 97,30 persen. Jumlah tenaga kerja dari BPS yang dirilis Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan kenaikan 6,03% dari 107.657.509 pada 2012 meningkat menjadi 114.144.082 pada 2013. Jika para pelaku dan masyarakat UKM ini diberdayakan tentu dapat meningkatkan dan mengoptimalkan GNNT melalui transaksi non tunai yang sangat besar baik jumlah dan frekuensinya.

Untuk perusahaan besar (*Large Enterprises*) penggunaan transaksi non tunai tidak ada permasalahan yang berarti karena adanya tuntutan penggunaan teknologi yang maju, namun untuk perusahaan *Small and Medium Enterprises* atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang mengimplementasikan dan pemasangan mesin EDC masih sangat jarang, apalagi di kota kecil. Banyak faktor-faktor yang menghambat pengelola UKM tidak melakukan implementasi, yang menyebabkan masyarakat berpotensi tidak melakukan transaksi non tunai. Dengan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat adanya implementasi dan pemasangan

mesin EDC di lingkungan UKM ritel. Penelitian juga diperlukan untuk menetapkan strategi kompetitif berdasarkan berbagai sudut pandang yang luas, berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model strategi bersaing yang efektif berdasarkan *Analytical Hierarchy Process (AHP)*.

AHP digunakan untuk menentukan bobot masing-masing faktor pendukung perkembangan implementasi EDC pada UKM ritel, sehingga dapat dilihat factor atau masalah yang paling penting (memiliki bobot tertinggi). Sehingga dalam penelitian ini dirumuskan masalah penelitian berupa: Faktor pendukung utama apa yang paling dominan yang menyebabkan para pelaku UKM berkeinginan memasang dan mengimplementasikan mesin EDC di lingkungan bisnisnya?

AHP adalah sistem multi-kriteria pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Saaty (1980, 1990) yang memungkinkan pembuat keputusan untuk struktur masalah yang kompleks dalam bentuk hirarki. Tingkat pertama dari hirarki adalah tujuan. Dalam masalah ini, tujuannya adalah untuk mengevaluasi secara efektif. Tingkat kedua mencakup kriteria, kriteria yang relevan yang dibutuhkan untuk mengevaluasi termasuk biaya obat, desain manfaat, program layanan untuk membantu menutupi karyawan, administrasi dan distribusi, dan penilaian karyawan/pensiunan (Hogan et al., 2009).

Metode AHP membantu memecahkan masalah yang kompleks dengan penataan hirarki kriteria, pihak yang berkepentingan, hasil dan dengan menarik

berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas. Metode ini juga menggabungkan kekuatan perasaan dan logika yang bersangkutan mengenai berbagai isu, dan kemudian mensintesis beragam berbagai pertimbangan dalam hasil yang sesuai dengan perkiraan kami intuitif seperti yang disajikan pada pertimbangan yang telah dibuat. (Saaty, 1990).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian *survey* dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sumber data adalah data sekunder dan data primer. Metode yang digunakan melalui wawancara semi terstruktur. Metode pengumpulan pada responden ini melalui pengisian kuisisioner yang telah disiapkan. Data sekunder diperoleh dari data-data yang sudah tersedia baik dari lingkungan Bank Indonesia sendiri maupun sumber data lain yang sudah tersedia. Data primer diperoleh langsung dari responden yang merupakan ahli, karyawan atau petugas promosi implementasi EDC dari bank untuk menentukan faktor-faktor kendala level satu dan level dua implementasi EDC di UKM retail. Metode yang digunakan untuk memperoleh data dari responden ini adalah melalui wawancara semi terstruktur. Responden lain adalah pemilik / Manajer atau Kepala Toko UKM ritel yang telah mengimplementasikan EDC untuk menentukan preferensi tingkat tinggi rendahnya kendala. Metode pengumpulan pada responden ini adalah melalui pengisian kuisisioner yang telah disiapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mendefinisikan Masalah dan Membuat Struktur Hirarki

Faktor pendukung dan sub faktor telah dipublikasikan oleh Sutarmin dan Adi Susanto (2017) yang meneliti tentang potensi implementasi transaksi non tunai. Selanjutnya dalam penelitian ini disusun hierarki untuk membantu pengambilan keputusan dengan memperhatikan seluruh criteria keputusan yang terlibat dalam sistem. Penelitian ini menggunakan *analytical hierarchy process*, maka kuisisioner yang digunakan bertujuan untuk membandingkan masing-masing factor pendukung dan penghambat. Skala yang digunakan adalah *saaty's scale 1-9* dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1 = sama mendukung / menghambat, yang berarti kedua faktor yang dibandingkan memiliki bobot sama besar dalam menjadi pendukung/penghambat penggunaan mesin EDC pada UKM Ritel di Kabupaten Banyumas.
- 3 = Sedikit lebih mendukung/menghambat, yang berarti salah satu faktor yang dibandingkan memiliki bobot sedikit lebih mendukung/menghambat dari factor satunya.
- 5 =Agak mendukung/menghambat, yang berarti salah satu faktor yang dibandingkan memiliki bobot agak lebih mendukung/menghambat dari factor satunya .

7 = Jauh mendukung/menghambat, yang berarti salah satu faktor yang dibandingkan memiliki bobot jauh lebih mendukung/menghambat dari factor satunya .

9 = Mutlak lebih menghambat, yang berarti salah satu faktor yang dibandingkan memiliki bobot yang mutlak lebih mendukung atau menghambat dari factor satunya .

2,4,6,8 = merupakan nilai tengah jika responden ragu-ragu dalam menentukan skala, misal di 4 di mana responden ragu-ragu untuk menentukan antara skala 3 dan 5.

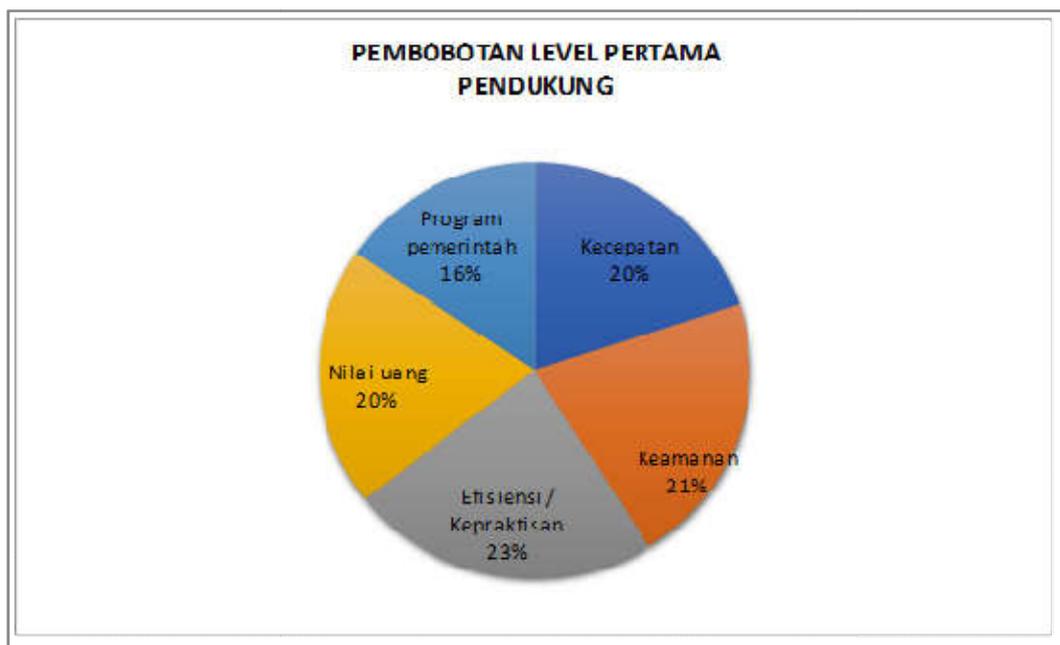
Dengan menggunakan skala perbandingan ini maka matrixs yang dibuat berdasarkan jawaban responden bersifat matriks resipokal atau kebalikan. Misalnya faktor A lebih menghambat dari faktor B dengan bobot 7, maka faktor B memiliki $1/7$ lebih menghambat dari faktor A.

Perbandingan Berpasangan (*Pairwise Comparison*)

Langkah berikutnya adalah membuat matriks perbandingan berpasangan berdasarkan jawaban responden. Bentuk matriks perbandingan berpasangan dalam penelitian ini dibagi ke dalam 2 faktor utama, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor utama pendukung memiliki 6 sub-faktor di dalamnya yang masing-masingnya juga dibuat matriks perbandingan berpasangan, yaitu kecepatan, keamanan, efisiensi/kepraktisan, nilai uang dan program pemerintah. Sedangkan untuk faktor utama penghambat, memiliki 5 sub-faktor. yaitu masalah prosedur dan administrasi, masalah biaya, masalah mesin dan teknologi, masalah

fleksibilitas serta masalah lingkungan bisnis. Masing-masing sub-faktor dari faktor penghambat inipun dibuat matriks perbandingan berpasangannya.

Hasil dari perhitungan bobot dari faktor pendukung disajikan dalam *pie diagram* sebagai berikut:



Gambar 1 Bobot Faktor Pendukung

Sedangkan hasil dari perhitungan bobot dari faktor pendukung dan sub faktornya dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.

Pembobotan Level Pertama dan Kedua dari Faktor Pendukung

| Level Pertama | | Bobot Final | Level Kedua | |
|--------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|---------------|
| Faktor Pendukung | Bobot | | Sub Faktor Hambatan | Bobot (%) |
| Kecepatan | 0,2932 | 0,1992 | Sekaligesekdarisetiaptransaksi | 0,0584 |
| | 0,2205 | | Tidakperlumenatauang | 0,0439 |
| | 0,2361 | | Tidakperlumenghitungguang | 0,0470 |
| | 0,2500 | | Waktu transaksilebihcepat | 0,0498 |
| keamanan | 0,2785 | 0,2119 | Ada buktitransaksi | 0,0590 |
| | 0,2226 | | Tidakadaresikodirampok / dicuri | 0,0472 |
| | 0,2292 | | Tidakadaresikokehilangan | 0,0486 |
| | 0,2696 | | Tidakadaresikouangpalsu | 0,0571 |
| Kepraktisan | 0,2228 | 0,2324 | Tidakperlubanyakmembawauangtunai | 0,0518 |
| | 0,1816 | | Tidakperluuangrecekembalikan | 0,0422 |
| | 0,2298 | | Pembayaranseuaijumlahtransaksi | 0,0534 |
| | 0,2060 | | Tidakperluambil / setoruang di bank | 0,0479 |
| | 0,1595 | | Pembayarankevendordengan non tunai | 0,0371 |
| Nilai Uang | 0,3915 | 0,2017 | Terjagatidakterkenainflasi | 0,0790 |
| | 0,3233 | | Mendapatkanbungaataujasa | 0,0652 |
| | 0,2851 | | Kemungkinanadapathadiahundian | 0,0575 |
| Program Pemerintah | 0,4276 | 0,1548 | Mendukung Program pemerintah GNNT | 0,0662 |
| | 0,2520 | | Peredaranuangtunaiberkurang | 0,0390 |
| | 0,3203 | | Multiplier efekekonomi | 0,0496 |
| Jumlah | 5,0000 | 1,00 | Jumlah | 1,0000 |

Sumber: Data Primer (diolah)

Berdasarkan tabel pembobotan dari faktor dan sub-faktor pendukung di atas, berikut ini adalah pembahasannya diurutkan berdasarkan besarnya bobot yang diperoleh:

1) Kepraktisan

Hasil penghitungan bobot, faktor kepraktisan memiliki bobot paling besar, yaitu 0,2324 atau sebesar 23,24%. Sub faktor dari faktor kepraktisan ini ada 4, yaitu tidak perlu banyak membawa uang tunai, tidak perlu uang receh

kembalian, pembayaran sesuai jumlah transaksi, tidak perlu ambil atau setor uang di bank dan pembayaran ke vendor. Dari kelima sub-faktor tersebut, yang memiliki bobot paling besar di level kedua adalah sub faktor pembayaran sesuai jumlah transaksi dengan bobot 0,534 atau sebesar 5,34%.

2) Keamanan

Faktor yang menduduki peringkat kedua dalam hal mendukung penggunaan mesin EDC pada UKM Ritel di Kabupaten Banyumas adalah keamanan bobot sebesar 0.2119 atau 21,19 %, Meskipun *keamanan* menjadi faktor pendukung peringkat kedua, namun sub faktor ada bukti transaksi merupakan sub faktor yang memiliki bobot terbesar pada level kedua hierarki. Hal ini berarti sub faktor ada bukti transaksi adalah sub faktor yang paling dominan mendukung penggunaan mesin EDC pada UKM Ritel dengan bobot 0,2785 atau 27,85 %.

3) Nilai Uang

Faktor pendukung dari nilai uang memiliki bobot sebesar 0.2017 atau 20,17 %. Faktor Nilai Uang ini memiliki sub faktor Terjaga tidak terkena inflasi dengan bobot 0,3915 atau 39,15%, Mendapatkan bunga atau jasa dengan bobot 0,3233 atau 32,33% dan Kemungkinan dapat hadiah undian dengan bobot 0,2851 atau 28,51%.

4) Kecepatan

Faktor kecepatan merupakan faktor pendukung di peringkat keempat dengan bobot 0.1992 atau 19.92 %. Sub faktor yang memiliki bobot paling besar dalam faktor *Kecepatan* adalah Sekali gesek dari setiap transaksi dengan

bobot 0,2932 atau 29,32 %. Sedangkan sub faktor Waktu transaksi lebih cepat memiliki bobot 0,2500 atau 25,00 %, sub faktor Tidak perlu menghitung uang memiliki bobot 0,2361 atau 23.61 % dan sub faktor Tidak perlu menata uang memiliki bobot 0,2205 atau 22,05 %.

5) Program Pemerintah

Faktor pendukung program pemerintah merupakan faktor dengan bobot paling kecil yaitu sebesar 0.1547 atau 15,47 %. Sub faktor dari program pemerintah adalah Mendukung Program pemerintah GNNT. Sub faktor Program pemerintah GNNT yang memiliki bobot paling besar yaitu 0,4276 atau 42,76 %. Sub faktor yang kedua adalah Multiplayer Efek dengan bobot 0,3203 atau 32,03 % dan sub faktor yang ketiga adalah Peredaran uang tunai berkurang dengan bobot 0,2520 atau 25,2 %.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa implementasi gerakan non tunai dapat ditingkatkan dengan memperhatikan potensi pendukung berupa: (1) Kecepatan, (2) Keamanan, (3) Efisiensi / Kepraktisan, (4) Nilai uang, dan (5) Program pemerintah.. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diatas diketahui bahwa faktor pendukung utama yang mendapatkan prioritas tertinggi adalah efisiensi atau kepraktisan sebesar 23 %. Pemangku kepentingan dapat mempertimbangkan dalam strategi peningkatan implementasi nontunainya dengan mengedepankan efisiensi atau kepraktisan dan berusaha menekan masalah lingkungan bisnis UKM retail yang belum mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia (BI). 2014. Laporan Perekonomian Indonesia 2014 : Memperkokoh Stabilitas, Mempercepat Reformasi Struktural untuk Memperkuat Fundamental Ekonomi. BI. Jakarta
- Bank Indonesia. 7 Juli 2013. *Newsletter Bank Indonesia*. <http://www.bi.go.id/>
- Bank Indonesia. 7 Juli 2013. *Batas Maksimum Suku Bunga Kartu Kredit*. <http://www.bi.go.id/>
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 7 Juli 2013. *Kredit Bermasalah di Kartu Kredit*. <http://www.lppi.or.id/>
- Bank Indonesia, 7 Juli 2013. *Peraturan Sistem Pembayaran*. <http://www.bi.go.id>
- Bank Indonesia, 7 Juli 2013. *Info dan Edukasi Konsumen (Alat Pembayaran)*. <http://www.bi.go.id/>
- Hogan, K. and G. Olson (2004), "A multi-criteria Decision Model for Portfolio Allocation for the Individual Investor," *Mathematical Programming: Applications of Management Science*, 11, 3-16.
- Hogan, K.M., G.T. Olson and G.P. Sillup (2009), "Helping the Self-insured Company Select the Right Pharmacy Benefits Manager: An Analytical Hierarchy Process Method," *Research in Healthcare Financial Management*, 12(1), 59-75.
- Ishizaka, A. and M. Lusti (2004), "An Expert Module to Improve the Consistency of AHP Matrices," *International Transactions in Operational Research*, 11, 97-105.
- Mbiti, Isaac and Weil, David N. 2013. The Home Economics of E-Money: Velocity, Cash Management, and Discount Rates of M-Pesa Users *American Economic Review*. May 2013, Vol. 103 Issue 3 :369-374.
- Saaty, T.J. (1980), *The Analytical Hierarchy Process*, New York, McGraw Hill.
- Saaty, T.J. (1990), "How to Make a Decision: the Analytic Hierarchy Process," *European Journal of Operational Research*, 48, 9-26.
- Sutarmin, S., & Susanto, A. (2017). Potensi Pengembangan Transaksi Non Tunai Di Indonesia. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 7(1).
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung
- Warjiyo, P. 2006. Non-Cash Payments and Monetary Policy Implications in Indonesia. Di dalam: Bank Indonesia. Jakarta: Seminar Internasional "Toward Less Cash Society in Indonesia".

Yudisthira, A., HAscaryani, T.D, 2014, AnalisisFaktor yang
MempengaruhiPreferensi dan
AkseptabilitasTerhadapPenggunaanKartuPembayaranElektronik,
JurnalMahasiswa FEB, UB